



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.445, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana Kerja.  
Tahun 2012.

## **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.57/MENHUT-II/2011**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Renja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2012.

**Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Renja Tahun 2012 mengacu pada Renja Unit Kerja Eselon I-nya.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 ini merupakan rencana yang proses penyusunannya melibatkan para pihak baik didalam lingkup Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah dan masyarakat, yang dimulai dari identifikasi permasalahan, capaian pembangunan kehutanan Tahun 2010, perkiraan capaian Tahun 2011 dan rencana Tahun 2012 melalui forum Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Daerah di seluruh provinsi (Rakorenbanghutda) serta Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional (Rakorenbanghutreg). Usulan program dan kegiatan Tahun 2012 selanjutnya di bahas di dalam *retreat* tingkat Menteri di Istana Bogor yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Dari hasil ini diperoleh pagu indikatif sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor : 0091/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011, yang selanjutnya dilakukan Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kemenhut, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan pada tanggal 6 April 2011.

Kesepakatan hasil pertemuan tiga pihak selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendistribusikan rencana capaian Tahun 2012 ke setiap provinsi dan dibahas dalam pertemuan tiga pihak antara Kemenhut, BAPPENAS dan BAPPEDA (didampingi DISHUT Provinsi) untuk menyepakati capaian pembangunan kehutanan di tingkat provinsi dalam forum Pramusrenbangnas (pertemuan pendahuluan dari Musyawarah Pembangunan Nasional), dan selanjutnya dibahas dalam Musrenbangnas yang melibatkan seluruh nama Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia.

Beberapa upaya di atas, diharapkan dapat memperluas keterlibatan para pihak meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kemenhut Tahun 2012. Semata-mata, hal ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab dan peran yang diambil Kemenhut di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang ditunjukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014.

Khusus di lingkungan internal Kemenhut, upaya ini diharapkan dapat mendorong reformasi perencanaan, yang secara langsung diharapkan dapat mendorong reformasi birokrasi dengan adanya akuntabilitas pelaksanaan program (*outcome*, ditunjukkan dalam indikator kinerja utama/IKU) yang menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon I, dan pelaksanaan kegiatan (*output*, ditunjukkan dalam indikator kinerja kegiatan/IKK) yang menjadi tanggung jawab dari Pejabat Eselon II dan kepala UPT.